



Vol. 12 No. 3 September 2025

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 372-381

Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

ANALISIS PENGAWASAN TATA KELOLA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PADA KSP KOPDIT PINTU AIR CABANG KEWAPANTE

Magdalena Familia Nean¹, Andreas Rengga², Wihelmina M. Yulia Jaeng³
Universitas Nusa Nipa, Indonesia¹²³

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT
Email: femilianeanean@gmail.com

Abstrack

This research aims to analyze the governance oversight mechanisms employed to enhance accountability at Pintu Air Credit Union, Kewapante Branch. A qualitative descriptive analysis approach was utilized, incorporating observation, interviews, and documentation as primary data collection techniques. The data sources comprised both primary and secondary data. The study involved five key informants: the Manager of Pintu Air Credit Union, Kewapante Branch, the supervisor, the Committee Chairperson, the Committee Vice-Chairperson, and the Account Officer. The findings reveal that Pintu Air Credit Union, Kewapante Branch, has established a disciplined internal oversight and reporting system that promotes transparency while minimizing conflicts of interest. Accountability is evidenced through comprehensive transaction audits and robust internal control mechanisms. Responsibility in Pintu Air Credit Union, Kewapante Branch is seen in the obligations of each employee, especially in the inspection process after collection to ensure that all transactions are recorded correctly. The independence of both internal and external audits facilitates effective risk management. Fairness is evident in the organization's open recruitment processes and equitable competency development programs.

Keywords: Oversight, Credit Union Governance, Accountability, Savings and Loan Credit Unions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan tata kelola koperasi dalam meningkatkan akuntabilitas pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari Manager KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante, Supervisor, ketua komite, wakil komite, dan Account Officer. Hasil penelitian menunjukkan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante telah menerapkan sistem pengawasan dan pelaporan internal yang disiplin, menjamin transparansi, serta meniadakan konflik kepentingan. Akuntabilitas terbukti melalui pemeriksaan transaksi berbasis bukti dan pengendalian internal yang kuat. Tanggungjawab dalam KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante terlihat dari kewajiban setiap pegawai, khususnya dalam proses pemeriksaan setelah penagihan, untuk memastikan bahwa seluruh data transaksi tercatat dengan benar. Independensi audit internal dan eksternal memastikan efektivitas pengendalian risiko. Kewajaran tercermin dari rekrutmen terbuka dan program pengembangan kompetensi yang adil.

Kata Kunci : Pengawasan, Tata Kelola Koperasi, Akuntabilitas, Koperasi Simpan Pinjam

Pendahuluan

Peran koperasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koperasi di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat dan peran penting dalam memberdayakan masyarakat lokal terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil (Dwipradnyana, 2020). Koperasi didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kebersamaan dan prinsip demokrasi ekonomi (Wibowo *et al.*, 2024). Koperasi di nilai sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional (Jumaidi, 2021).

Koperasi berakar pada budaya masyarakat yang menekankan pada kebersamaan dan kesejahteraan kolektif (Wardhani *et al.*, 2023). Prinsip ini menjadikan koperasi sebagai alat penting dalam memperkuat ekonomi rakyat (Rahma *et al.*, 2024). Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis (Lenasari, 2022).

Menurut Undang-Undang Dasar No. 25 tahun 1992 pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan dan pengawasan koperasi. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Nuryadi, 2023).

Pengawasan sebagai Upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri (Sitorus, 2020). Pengawasan itu sendiri didefinisikan dapat diartikan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Misbah *et al.*, 2022).

Pengawasan internal, yang umumnya dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi, merupakan langkah awal yang penting. Namun, dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pengawasan internal saja tidaklah cukup (Istiqomah, 2022). Pengendalian internal yang efektif melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah (Patricia, 2024).

Pengawasan eksternal, seperti audit oleh akuntan publik atau pemeriksaan oleh dinas koperasi, diperlukan untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pentingnya pengawasan eksternal dikarenakan pengawasan eksternal memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: Pertama memastikan kepatuhan, dimana pengawasan eksternal membantu memastikan bahwa koperasi telah mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedua meningkatkan akuntabilitas dalam pengawasan eksternal meningkatkan akuntabilitas pengurus dan pengawas koperasi kepada anggota dan pihak terkait lainnya, kemudian pengawasan eksternal dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga koperasi yang memiliki sistem pengawasan yang baik akan lebih dipercaya oleh anggota, pemangku kepentingan, dan lembaga keuangan (Muhaziroh, 2024). Sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, koperasi dituntut untuk menjaga kepercayaan anggotanya melalui tata kelola yang baik.

Salah satu elemen penting dalam tata kelola koperasi adalah pelaporan keuangan yang transparan, yang tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga alat untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan di antara anggota (Mahmud *et al.*, 2023). Dalam hal ini, koperasi diharapkan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola aspek keuangan, operasional, dan pengambilan keputusan (Fadilah *et al.*, 2024).

Good cooperative goverance mencakup proses bagaimana keputusan dibuat dan dijalankan, serta bagaimana tanggung jawab dan pengawasan dijalankan oleh struktur organisasi. Kualitas tata kelola ditentukan oleh sejauh mana struktur organisasi mampu mendukung sistem pengendalian internal, pengawasan, dan pelaporan yang efektif. Menurut Rachmawati *et al.*, (2023), penerapan prinsip *Good cooperative goverance* pada koperasi melibatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban.

Tata kelola yang baik sangat diperlukan di koperasi. Profesionalitas dan akuntabilitas di koperasi bertujuan agar tidak merugikan pihak manapun. Profesionalitas dan akuntabilitas dapat diterapkan dengan tujuan memberikan laporan keuangan, pada rapat anggota tahunan (RAT),

Koperasi kepada anggotanya secara transparan agar para anggotanya mengetahui permasalahan keuangan yang sedang dialami Koperasi (Wigun *et al.*, 2024).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau hasil keputusan yang dicapai, sesuai wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi, baik terhadap administrasi, keuangan serta program yang berkaitan dengan visi, misi organisasi yang berdasarkan pada kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Fungsi akuntabilitas lebih menekankan pada pelaksanaan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Prinsip akuntabilitas merupakan suatu ciri pemerintahan yang baik, dimana semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya.

Akuntabilitas koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja yang dicapai. Ruang lingkup penerapan akuntabilitas pada koperasi meliputi indikator penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen dan indikator akuntabilitas keuangan (Wigun *et al.*, 2024). Dalam organisasi akuntabilitas mencakup pelaporan secara transparan tentang kinerja, penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. akuntabilitas diharapkan berdampak pada terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra koperasi.

Di Indonesia, koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian reantenir adalah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi (Arinda *et al.*, 2023). Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang merupakan entitas ekonomi yang memiliki peran sentral dalam memberdayakan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan (Fadliansyah *et al.*, 2022).

KSP memiliki peran vital dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya bagi anggotanya, dengan berbagai cara. Pertama, menyediakan fasilitas kredit dengan syarat yang lebih mudah bagi anggotanya. Kedua, mendorong praktik tabungan yang konsisten di kalangan anggota untuk membangun modal independen. Ketiga, memberikan edukasi yang lebih mendalam tentang prinsip dan manfaat koperasi. Keempat, melindungi anggotanya dari praktik pinjaman berisiko tinggi yang sering ditawarkan oleh rentenir. Ini semua merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi.

Berdasarkan hasil observasi pegawai koperasi bagian *account office* seringkali tidak melakukan pemeriksaan setelah penagihan. Ini menjadi masalah besar karena tanpa pengecekan,

siapa pun sulit memastikan kebenaran catatan transaksi yang mungkin terjadi adanya kesalahan pencatatan. Hal ini membuat akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban penuh atas setiap tugas dan transaksi jadi lemah. Dengan masalah yang ada terdapat juga, pegawai koperasi di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.

Tabel 1.1 Latar belakang pendidikan pegawai koperasi di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante.

Pendidikan	Jabatan	Jumlah
Sarjana Kehutanan	Manager Cabang	1 Orang
Sarjana Teknik	Supervisor, Account Officer	2 Orang
Sarjana Pertanian	Ketua Komite	1 Orang
Sarjana Filsafat	Wakil Komite	1 Orang
D3/ Kebidanan	Bendahara	1 Orang
Bahasa Sastra	Kasir/Teller	1 Orang
Sarjana Komunikasi	ADK	2 Orang
Sarjana Pendidikan	<i>Account Office</i>	6 Orang
SMA/SLTA	ADM	6 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai koperasi di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante memiliki latar belakang pendidikan yang sangat beragam dan tidak didominasi oleh latar belakang pendidikan sarjana Ekonomi ataupun yang memahami terkait tata kelola. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pegawai koperasi di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante dalam memahami dan menjalankan tugas diluar dari latar belakang pendidikan mereka, sehingga sulit memastikan pekerjaan yang dilakukan dengan standar yang konsisten dan akuntabel.

Berlandaskan pada temuan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru memiliki fokus pada konteks pengawasan tata kelola koperasi untuk mencapai akuntabilitas menggunakan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante sebagai studi kasus yang memberikan konteks lokal yang lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana pengawasan dan tata kelola yang baik dapat memperkuat akuntabilitas dalam koperasi serta memberikan rekomendasi praktik untuk perbaikan di lapangan.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang ada, perbedaan penelitian sebelumnya dan perbedaan hasil penelitian. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis**

Pengawasan Tata Kelola Koperasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante”

Tinjauan Teori Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan yang memiliki suatu kontrak dimana *principal* (pemilik atau pemegang saham) memberikan perintah kepada *agent* (manajer) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi *principal* (Sugiarto *et al.*,2023).. (Meckling, W. H., & Jensen, 1976) menjelaskan Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Hendra *et al.*,2020).

Sejarah dan Pengertian Koperasi

Koperasi pertama kali muncul pada awal abad ke-19. Pada masa itu terutama di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh berada pada puncak penderitaannya (Septianingrum, 2018). Menurut Jumaidi (2021), Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya yang berlandaskan atas kaidah usaha ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat di lingkungan kerja pada umumnya.

Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)” (Nuryadi, 2023

Tata Kelola

Tata kelola adalah kombinasi proses dan struktur untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan pemilik usaha dengan memerhatikan kepentingan pihak-

pihak yang terkait dengan usaha tersebut (*stakeholders*) yang meliputi karyawan, pelanggan, pemasok dan pihak terkait lainnya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban bagi pihak pemegang amanah yang diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban, pengungkapan, penyajian serta pelaporan atas segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah sebagai pemimpin kepentingan yang mempunyai hak serta wewenang untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Saputri, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengawasan tata kelola koperasi dalam meningkatkan akuntabilitas. Dalam penelitian berlangsung peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan mendalam untuk mengeksplorasi fokus penelitian. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi kepada Manager Cabang, Supervisor, Ketua Komite, Wakil Komite dan *Account Office* yang kemudian dikelola oleh peneliti. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi memberikan wawasan mendalam tentang perilaku dan makna dari objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada tujuan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara mendalam dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan detail. Dokumentasi dalam melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan sebagaimana yang dikemukakan menggunakan model Miles and Huberman (1992,22) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik untuk

memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian menggunakan: Perpanjangan pengamatan, Ketekunan pengamatan, Triangulasi.

Penelitian ini, terdapat empat (4) tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: Tahap Pra Lapangan Tahap Pekerjaan Lapangan Tahap Analisa Data Tahap penulisan Laporan Hasil Penelitian

Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan Tata Kelola Koperasi dalam Prinsip Keterbukaan

Hasil penelitian pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante menunjukkan bahwa koperasi ini telah memiliki sistem pengawasan dan pelaporan internal yang cukup disiplin dan terstruktur, khususnya dalam hal pengelolaan informasi status penagihan serta pencatatan transaksi oleh petugas lapangan (*Account Officer/AO*).

2. Pengawasan Tata Kelola Koperasi dalam Prinsip Akuntabilitas

Hasil penelitian pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante menunjukkan bahwa koperasi ini telah memiliki sistem pengawasan dan pelaporan internal yang cukup disiplin dan terstruktur, khususnya dalam hal pengelolaan informasi status penagihan serta pencatatan transaksi oleh petugas lapangan (*Account Officer/AO*).

3. Pengawasan Tata Kelola Koperasi dalam Prinsip Tanggungjawab

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante telah mengimplementasikan prinsip tanggung jawab dalam operasionalnya, yang terlihat jelas pada proses penagihan dan pengelolaan data. Prinsip ini menuntut setiap individu, dari petugas lapangan hingga manajemen, untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

4. Pengawasan Tata Kelola Koperasi dalam Prinsip Independensi

Hasil penelitian, KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante telah menjalankan fungsi audit internal yang independen melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang merupakan perpanjangan tangan dari pengawas kantor pusat dan bertugas langsung di cabang.

5. Pengawasan Tata Kelola Koperasi dalam Prinsip Kewajaran

Hasil penelitian, KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante telah menjalankan fungsi audit internal yang independen melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang merupakan perpanjangan tangan dari pengawas kantor pusat dan bertugas langsung di cabang.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengawasan Tata Kelola Koperasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante menurut UU No. 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri OJK No, 48 Tahun 2024 tentang tata kelola yang baik bagi lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam pasal 2 ayat (1), maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante telah menerapkan sistem pengawasan dan pelaporan internal yang cukup disiplin dan terstruktur. Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam tata kelola, dan mendukung pengurangan konflik kepentingan. KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante berhasil membangun sistem pengendalian internal yang dapat meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan anggota. SP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante telah mengimplementasikan prinsip tanggung jawab (dalam operasionalnya, yang terlihat jelas pada proses penagihan dan pengelolaan data). KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante memiliki mekanisme audit internal yang independen melalui SPI yang bekerja langsung di cabang serta audit eksternal yang rutin dilakukan. pegawai tetap.

Saran

Disarankan agar KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante menyelenggarakan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip *good goverance* koperasi secara rutin dan lebih spesifik, terutama bagi pegawai baru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait keuangan. Perlu ditingkatkan kapasitas satuan pengawasan internal baik dari sisi jumlah personel maupun keahlian audit dan manajerial agar dapat menjangkau lebih banyak kegiatan dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. SOP yang menjadi pedoman operasional perlu dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika operasional

dan perkembangan teknologi, agar tetap relevan dan efektif digunakan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan referensi-referensi lainnya untuk mengetahui Analisis Pengawasan Tata Kelola Koperasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante yang digunakan sebagai menambah wawasan dalam menganalisis masalah yang ada.

Daftar Referensi

- Ainnindya, A. K., & Kustini, K. (2025). Identifikasi Lapangan Dan Monitoring Evaluasi Koperasi Dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi Di Wilayah Pusat-Utara Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(1), 71-77.
- Alauddin, A. (2020). Kualitas Kegiatan Administrasi Pendidikan Di Sekolah Dan Hubungannya Dengan Pengawasan Profesional. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 5(1), 49-56.
- Anis, F. N., Dince, M. N., & Jaeng, W. M. Y. (2024). Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. Inisiatif: *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 425-440.
- Azizah, L. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Infaq (Di TPQ Al-Khuriyah Bangil-Pasuruan). *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2), 125-145.
- Azizah, T. N., Evitasari, P. A., & Kustiwi, I. A. (2024). Peran Strategis Internal Audit dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan: Studi kasus pada Perusahaan Sektor Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 240-251.